

PERAN PARTAI POLITIK DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Laviva Pratiwi

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

lavivapr26@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

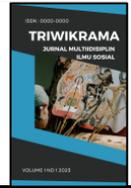
Salah satu prasyarat dalam berjalannya suatu negara yang menerapkan paham demokrasi adalah dengan adanya peran partai politik. Partai politik memiliki peran strategis dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia. Partai politik pada dasarnya merupakan 'jembatan' antara publik dan pemerintah. Pentingnya peran partai politik makin terasa ketika mereka menjadi jembatan bagi kepentingan masyarakat agar didengar oleh pemerintah, khususnya di parlemen, terlebih lagi dengan kondisi geografis Indonesia yang luas dan beragam. Beberapa peran partai politik tersebut, yaitu sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan sejauh mana peran partai politik dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan penggunaan teknik pengumpulan data mengenakan buku-buku, catatan, literatur dan lain sebagainya yang berkenaan dengan topik yang akan diteliti. Hasil penelitian menyatakan bahwa Partai politik

telah memanfaatkan media sosial untuk komunikasi dan sosialisasi guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Namun, fungsi rekrutmen masih menghadapi kendala seperti dominasi elit, politik dinasti, dan politik uang. Selain itu, pengelolaan konflik melalui partai politik belum optimal, terutama terkait politik identitas yang berpotensi memecah persatuan di masyarakat yang beragam.

Kata Kunci: Partai Politik; Peran Partai Politik; Demokrasi

ABSTRACT

One of the prerequisites for the functioning of a country that implements the principles of democracy is the presence of political parties. Political parties have a strategic role in realizing democracy in Indonesia. Political parties are essentially a 'bridge' between the public and the government. The importance of the role of political parties increases when they become a bridge for the interests of the public to be heard by the government, especially in parliament, particularly given Indonesia's vast and diverse geographical conditions. Some of these roles of political parties include being a means of political communication, a means of political socialization, a means of political recruitment, and a means of conflict regulation. The purpose of this research is to determine the extent of the role of political parties in realizing democracy in Indonesia. The research method used in this study is a literature review employing data collection techniques through books, notes, literature, and other materials related to the topic to be researched. The research results state that political parties have utilized social media for communication and socialization to increase public political participation. However, the recruitment function still faces obstacles such as elite dominance, dynastic politics, and money



politics. Moreover, conflict management through political parties has not been optimal, especially regarding identity politics that have the potential to divide unity in a diverse society.

Keywords: *Political Parties; Role of Political Parties; Democracy*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang berada di Asia Tenggara. Dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Dengan pernyataan tersebut, menggambarkan bahwa Indonesia merupakan negara yang bersifat demokratis dengan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Suryana et al (2022: 18) menyatakan bahwa demokrasi merupakan alat yang digunakan sebagai bentuk upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat. Suhartini (dalam Fatiha et al, 2022) menyebutkan bahwa sebagai suatu negara wajib memiliki peran untuk mewujudkan hukum dan penguasa yang telah terpilih secara sah berdasarkan suara rakyat sebagai wadah demokrasi.

Salah satu prasyarat dalam berjalannya suatu negara yang menerapkan paham demokrasi adalah dengan adanya peran partai politik. Kebebasan mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berserikat merupakan salah satu hak bagi setiap warga negara. Kebebasan berserikat menjadi salah satu dari hak asasi manusia yang penting bagi setiap orang sebagai bentuk pengakuan negara atas hak seorang warga negara yang wajib dimiliki, seperti hak untuk berada dalam suatu organisasi, kebebasan dalam berekspresi, hak terkait kesetaraan politik, hak untuk dipilih dan memilih.

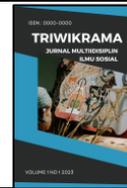
Sebagai upaya untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia, salah satu bentuk dari kebebasan berserikat adalah dengan adanya partai politik. Pembentukan partai politik didukung dalam UUD 1945 Pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Perubahan besar pada sistem politik yang ada terjadi pada saat tahun 1998 lalu menempatkan partai politik sebagai salah satu penopang sistem demokrasi yang berjalan. Partai politik memiliki berbagai fungsi yang dapat menjamin terlaksananya demokrasi secara efektif jika berbagai fungsi tersebut dijalankan dengan baik, serta berperan sebagai perantara antara warga negara dengan penyelenggara pemerintah.

Partai politik memiliki peran strategis dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia. Partai politik pada dasarnya merupakan ‘jembatan’ antara publik dan pemerintah (Agustino, 2020: 131). Sebagai negara demokratis, partai politik Indonesia perlu memenuhi perannya sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga prinsip demokratis di Indonesia dapat diwujudkan dengan ideal. Toloh (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum yang Demokratis” menyatakan bahwa terdapat berbagai permasalahan yang terdapat dalam partai politik sehingga dapat melemahkan partai politik dalam menciptakan produk hukum yang demokratis. Berbagai permasalahan tersebut terdiri dari demokratisasi internal, finansial, kaderisasi, serta pemilu yang tidak mendorong identifikasi partai dalam masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Demokrasi

Sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara, demokrasi mengandung pengertian bahwa dalam mendapatkan ketentuan atas masalah-masalah terkait dengan kehidupan masyarakat, masyarakatlah yang memiliki wewenang untuk memberikan ketentuan tersebut (Prayitno dan Prayugo, 2023). Secara *etimologis*, *demos* yang berarti dari rakyat atau penduduk



setempat dan *cratein* yang memiliki arti kekuasaan atau (kedaulatan) pusat pemerintahan merupakan pengertian dari demokrasi. Menurut Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dan Badan Pengkajian MPR (2018: 9) demokrasi adalah suatu konsep dari pemerintahan yang memiliki ciri khas dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Rakyat ditempatkan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menyelenggarakan pemerintahan sebuah negara merupakan konsep dari pemerintahan yang demokratis.

Konsep Partai Politik

Dalam sistem politik modern, partai politik berfungsi sebagai wadah yang menyalurkan aspirasi serta mengintegrasikan kepentingan publik ke dalam proses pengambilan keputusan. Pentingnya peran partai politik makin terasa ketika mereka menjadi jembatan bagi kepentingan masyarakat agar didengar oleh pemerintah, khususnya di parlemen, terlebih lagi dengan kondisi geografis Indonesia yang luas dan beragam (Agustino, 2020: 130). Secara sederhana, partai politik adalah wadah untuk mewakili berbagai gagasan yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi dan sistem politik modern. Sebuah negara yang menerapkan prinsip demokrasi, terdapat beberapa peran partai politik menurut Budiarto (dalam Khotimah dan Muwahid, 2022) antara lain:

1. Sarana Komunikasi Politik

Partai politik memiliki peran penting dalam menyalurkan berbagai aspirasi dari masyarakat. Sebagai sarana komunikasi antara rakyat dan pemerintah, penting adanya keselarasan pemikiran antara pihak yang menyampaikan dan menerima pesan. Dalam menjalankan peran tersebut, partai politik biasanya melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Menyerap pendapat dan keinginan yang berkembang di tengah masyarakat.
- b. Mengelompokkan pendapat dan aspirasi masyarakat yang memiliki kesamaan.
- c. Merumuskan aspirasi tersebut menjadi bentuk usulan politik. Usulan ini kemudian dimasukkan ke dalam program kerja partai, yang nantinya akan diperjuangkan kepada pemerintah demi menjaga ketertiban umum.

2. Sarana Sosialisasi Politik

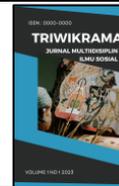
Partai politik berusaha agar keberadaannya dapat dikenal dan dipahami oleh masyarakat luas. Salah satu cara untuk mencapai hal itu adalah melalui kegiatan sosialisasi politik. Semakin baik proses sosialisasi dilakukan, biasanya akan semakin besar pula peluang partai untuk meraih kemenangan dalam pemilu. Agar dapat memenangkan dukungan, partai politik perlu membangun citra yang positif di mata masyarakat. Sosialisasi politik dapat dilakukan lewat berbagai cara, seperti kuliah umum, pelatihan administrasi, atau kursus lanjutan. Kegiatan-kegiatan tersebut umumnya dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama dan dilaksanakan secara terus-menerus agar hasilnya dapat dirasakan secara maksimal. Sosialisasi ini bersifat bertahap, mirip seperti proses perkembangan seseorang dari anak-anak menuju dewasa.

3. Sarana Rekrutmen Politik

Dalam menjalankan tugasnya, partai politik memiliki tanggung jawab untuk melakukan proses rekrutmen. Rekrutmen ini bertujuan untuk mencari calon pengurus dan anggota baru yang akan meneruskan keberlangsungan partai. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memperluas partisipasi politik di tengah masyarakat. Dalam prosesnya, partai politik perlu mampu menarik individu-individu yang memiliki kualitas baik. Hal ini penting karena kualitas orang yang direkrut akan mempengaruhi seberapa besar peluang mereka untuk berkembang dan berkontribusi dalam partai.

4. Sarana Pengatur Konflik

Indonesia sebagai negara yang menjamin kebebasan berpendapat tentu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan mereka. Namun, dalam praktiknya, perbedaan



pendapat sering kali menimbulkan ketegangan atau perselisihan antarwarga. Dalam kondisi seperti ini, partai politik diharapkan dapat berperan sebagai penyeimbang yang mampu mengelola perbedaan tersebut. Agar dapat menjalankan peran itu secara adil, partai politik seharusnya tidak memihak dan tetap bersikap netral terhadap semua kelompok yang terdapat dalam masyarakat.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Fatimah et al (2025) menyebutkan bahwa metode kepustakaan adalah suatu cara atau metode yang digunakan dalam penelitian dengan mengumpulkan informasi yang berasal dari berbagai sumber yang telah tertulis, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian sebelumnya, maupun dokumen resmi. Metode ini digunakan untuk membantu peneliti dalam mendalami teoritis topik yang sedang diteliti dan dapat membantu dalam menemukan kekurangan dalam penelitian yang ada. Rifa'i (dalam Fatimah et al, 2025) menyatakan bahwa dengan digunakannya metode ini, peneliti dapat lebih menjelajahi berbagai pandangan teoritis yang relevan, dan dapat dijadikan sebagai suatu kerangka panduan dalam memperdalam suatu penelitian empiris. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni dengan mengumpulkan data secara tidak langsung dengan meneliti objek yang bersangkutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

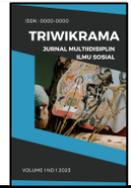
HASIL

Menurut Miriam Budiardjo (dalam Khotimah & Muwahid, 2022), partai politik memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi-fungsi strategis yang sejalan dengan prinsip demokrasi untuk mendukung pembangunan demokrasi di Indonesia. peran-peran partai politik tersebut meliputi komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan penyelesaian konflik. Apabila peran-peran ini dilaksanakan secara optimal dan konsisten, maka partai politik dapat menjadi pilar utama dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sarana Komunikasi Politik

Komunikasi politik di Indonesia mengalami transformasi digital yang cukup signifikan. Partai politik memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi politik yang efektif dalam memberikan suatu informasi kepada masyarakat seputar visi, misi, serta program yang telah dibuat oleh pemerintah. Komunikasi ini tidak hanya bersifat satu arah, melainkan partai politik wajib untuk menerima dan menyerap aspirasi masyarakat yang dapat dijadikan evaluasi atau bahan dari sebuah kebijakan. Dalam kenyataannya yang terjadi di era digital, beberapa partai politik Indonesia telah mengoptimalkan platform digital dan media sosial sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik.

Peran partai politik sebagai sarana komunikasi politik ini didukung dengan penelitian yang ditulis oleh Nina Adriana (2022) yang berjudul "Pandangan Partai Politik Terhadap Media Sosial Sebagai Salah Satu Alat Komunikasi Politik Untuk Mendekati Pemilih Muda (Gen Y dan Z): Studi Kasus PDI-P Dan PSI" menyatakan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai salah satu partai politik di Indonesia telah menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana komunikasi politik terhadap masyarakat. PDI-P telah menggunakan media sosial secara serius sebagai media iklan politik yang digunakannya untuk membangun *image* partai. PDI-P telah menggunakan berbagai platform media sosial, seperti *Instagram*, *Twitter*, *Tiktok*, dan *Facebook*. PDI-P cenderung memandang media sosial untuk *branding* partai dan tokoh partai.



Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga menggunakan media sosial untuk membangun *image* dari partai tersebut. Namun, bagi PSI, generasi muda sudah sepatutnya untuk hadir dalam sistem politik untuk dapat merubah tradisi politik Indonesia yang saat ini masih belum mencapai demokrasi yang ideal. Menurut pandangan PSI, generasi milenial dan Z tidak hanya berperan sebagai peserta dalam dunia politik, tetapi juga sebagai kelompok yang dapat memberikan tekanan kepada pemerintah. Dengan melibatkan anak muda dalam proses politik, diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat saat ini. Selain untuk membangun *image*, PSI memilih media sosial untuk membangun komunikasi dan edukasi politik kepada generasi milenial dan Z.

Kemudian, dalam penelitian yang ditulis oleh Fahruji dan Fahrudin (2023) yang berjudul “Pemanfaatan Media Sosial dalam Kampanye Politik Menjelang Pemilu 2024: Studi Kasus tentang Akun Media Sosial Partai Politik dan Politis” menyatakan bahwa partai-partai besar seperti Gerindra dan PDI-P aktif menggunakan platform seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, dan *TikTok* untuk kampanye politik menjelang Pemilu 2024. Dalam penelitian ini, Hal ini memperlihatkan bahwa media sosial sekarang menjadi salah satu strategi utama dalam kampanye politik modern. Partai politik dan para politisi yang mampu menggunakan media sosial secara efektif dapat meningkatkan jangkauan serta pengaruh mereka dalam persaingan politik menjelang Pemilu 2024.

Sarana Sosialisasi Politik

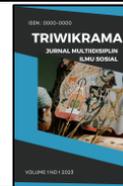
Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik berarti memiliki tanggung jawab untuk mendidik masyarakat mengenai nilai-nilai demokrasi. Selain untuk memperkenalkan nilai-nilai demokrasi, sosialisasi politik juga merupakan proses bagi partai politik dalam sistem politik. Sutmasa (2025) menyebutkan bahwa pendidikan politik merupakan salah satu elemen yang krusial dalam mewujudkan suatu demokrasi yang ideal. Dengan dilaksanakannya pendidikan politik melalui sosialisasi politik, maka dapat memberikan peningkatan dalam kesadaran dan pemahaman bagi masyarakat terkait hak dan kewajiban yang dimilikinya sebagai warga negara.

Dalam penelitian Fadhil dan Putra (2024) yang berjudul “Strategi Komunikasi Politik Partai Nasdem Untuk Gen-Z Pada Pemilu Legislatif Kota Bandung 2024 Melalui Instagram @Nasdem.Bdg”, mengungkapkan bahwa dalam penerapan peran sarana sosialisasi politik, Partai Nasional Demokrat (NasDem) telah menyadari bagaimana pemanfaatan media sosial sangat penting dalam menjangkau generasi muda. Partai NasDem menjalankan sebuah program yang ditujukan untuk memberikan pendidikan politik terhadap generasi muda, yaitu program Remaja Bernegara (RBN). Partai NasDem (dalam medcom.id, 2025) berpendapat bahwa pendidikan politik bagi generasi muda merupakan salah satu dari tanggung jawab partai politik.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga telah mengadakan kegiatan sosialisasi politik secara aktif melalui diskusi publik, pelatihan kepemimpinan, dan seminar di Kota Tegal (pkskotategal.id, 2025). Pada masa pemilu tahun 2024 lalu, PKS juga telah mengadakan sosialisasi politik di Srengseng Sawah, Jagakarsa. PKS menjalankan program yang bernama “PKS Menyapa” yang dalam program tersebut para anggota PKS, relawan, serta simpatisan terjun ke masyarakat secara bersama-sama untuk menyapa dan mensosialisasikan partai PKS. Anggota, simpatisan, dan relawan dari PKS melakukan pendekatan langsung dengan mendatangi rumah warga satu per satu guna menyampaikan pesan politik, visi dan misi partai, serta berbagai program yang mereka usung.

Sarana Rekrutmen Politik

Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik yaitu sarana kaderisasi dalam memilih dan mencari seseorang untuk mengisi posisi politik, baik calon legislatif maupun kepala daerah. Untuk



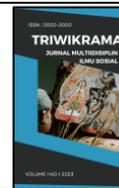
menjamin regenerasi partai dan meningkatkan perluasan dalam sistem demokrasi, rekrutmen politik merupakan sebuah langkah yang krusial untuk dilakukan dengan tepat. Untuk membentuk pemimpin dan kader yang setia serta berkualitas bagi partai politik, penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap sistem kaderisasi yang diterapkan oleh partai tersebut. Kaderisasi memiliki peran penting dalam menjamin masa depan organisasi yang lebih baik, karena melalui proses ini organisasi dapat mempersiapkan generasi penerusnya di masa mendatang (Sa'ban et al., 2025).

Dalam penelitian yang berjudul "Dinamika Personalisasi Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Wali Kota Solo 2020 (Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P))," Ridwan dan Fatkhuri (2023) menjelaskan bahwa proses pemilihan calon wali kota Solo oleh PDI-P pada Pilkada 2020 memperlihatkan adanya dua persoalan dalam internal partai. Pertama, ketua umum PDI-P memilih calon wali kota secara sepihak dengan alasan hak prerogatif, tanpa melibatkan struktur partai lainnya, khususnya DPC PDI-P Surakarta. Hal ini mencerminkan adanya dominasi yang terlalu besar dari ketua umum. Kedua, penerapan kebijakan internal partai yang tidak konsisten selama proses rekrutmen menunjukkan lemahnya kemampuan organisasi dalam menjalankan mekanisme partai secara adil dan merata.

Hafsari et al (2022) dalam penelitiannya yang berjudul "Peran Mesin Partai Politik Dalam Pembentukan Dinasti Ratu Atut Chosiyah di Provinsi Banten", membahas tentang adanya politik dinasti di sebuah daerah yang merupakan hasil dari rekrutmen politik yang kurang baik. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa bertahannya kekuasaan politik dinasti disebabkan oleh realitas demokrasi yang bersifat kapitalistik dan liberal, di mana calon tanpa dukungan finansial yang kuat sulit untuk bersaing. Karena itu, partai politik cenderung mengambil pendekatan praktis dengan menawarkan kesempatan pencalonan kepada petahana sebagai strategi membangun kerjasama antar partai dalam pilkada. Contohnya, Partai Golkar berperan sebagai alat politik utama bagi Dinasti Ratu Atut dengan menyebar keluarga dekatnya ke posisi strategis di eksekutif dan legislatif, sehingga pengaruh dinasti tersebut tetap terjaga hingga kini.

Selanjutnya, Begouvic (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "*Money Politik Pada Kepemiluan di Indonesia*", menyatakan bahwa praktik politik uang atau *money politik* menjadi masalah utama dalam setiap proses rekrutmen politik, baik dalam pemilu maupun dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Praktik politik uang pada Pilkada Kota Palembang tahun 2018 tergolong tinggi dan memiliki pengaruh besar terhadap perolehan suara. Meskipun praktik ini masih terjadi, tidak ada tindak lanjut hukum karena masyarakat tidak melaporkan kasus tersebut dan kinerja panwaslu kurang maksimal akibat keterbatasan fasilitas dan dukungan operasional. Dengan adanya praktik politik uang, maka dapat menyebabkan berbagai hal-hal negatif selama masa jabatannya. Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, salah satu faktor yang mendorong kepala daerah melakukan korupsi adalah mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sa'ban et al (2025) menyatakan bahwa dalam proses kaderisasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) khususnya DPC PKB Kabupaten Buton melalui kegiatan seperti seminar, diskusi politik, dan kampanye pengenalan partai. Sasaran kaderisasi mencakup masyarakat yang sudah terorganisir maupun yang belum. Di lapangan, partai mengajak masyarakat mengenal visi dan misi partai. Keberhasilan kaderisasi diukur dari sejauh mana masyarakat berpartisipasi dalam proses tersebut. PKB meyakini bahwa Pendidikan Kader Pertama (PKP) berperan penting dalam menjaga keberlanjutan dan mempercepat pelaksanaan program perjuangan partai, sekaligus mempersiapkan lahirnya kembali kepemimpinan PKB.



Di tengah keberagaman masyarakat seperti di Indonesia, perbedaan pandangan politik dan sosial merupakan sesuatu yang lumrah. Dalam hal ini, partai politik berperan sebagai perantara yang dapat meredam potensi konflik melalui dialog dan upaya kompromi. Menurut Maaruf (dalam Yehezkiel & Takalamingan, 2023) di Indonesia, politik identitas muncul karena adanya masalah seperti kuatnya pandangan keagamaan tertentu, perbedaan suku, ideologi, dan berbagai kepentingan yang biasanya dikendalikan oleh para elit melalui cara dan pendekatan mereka sendiri. Politik identitas yang dibangun atas dasar kesamaan kelompok sering memicu konflik antara pihak mayoritas dan minoritas. Habibi (dalam Yehezkiel & Takalamingan, 2023) menyatakan bahwa di Indonesia, hal ini terlihat dari paradigma demokrasi liberal yang menempatkan Pancasila sebagai prinsip utama, namun justru menjadikan peran agama yang memiliki nilai mendalam dianggap sebagai ancaman bagi kehidupan masyarakat yang beragam.

Dalam BBC News Indonesia (2023) Partai Ummat dengan tegas mengatakan bahwa mereka mendukung politik identitas, dan mengungkapkan bahwa mereka adalah politik identitas. Mereka berpandangan bahwa tanpa landasan moral yang bersumber dari agama, arah politik menjadi kabur dan rentan dikendalikan oleh nilai-nilai yang berubah-ubah sesuai situasi dan kepentingan sesaat. Sebaliknya, dalam kampanye politik PSI menolak adanya penggunaan politik identitas. Dalam BBC News Indonesia (2023) Wakil Ketua PSI meyakini bahwa dengan adanya politik identitas dapat memicu timbulnya regulasi atau produk politik yang bersifat diskriminatif dan berisiko menimbulkan intoleransi politik. Dalam konteks politik identitas, Partai Ummat dan PSI sangat bertolak belakang dan memiliki pandangannya tersendiri.

PEMBAHASAN

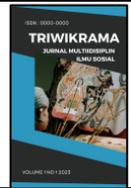
Sarana Komunikasi Politik

Partai politik memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi politik yang efektif dalam memberikan suatu informasi kepada masyarakat seputar visi, misi, serta program yang telah dibuat oleh pemerintah. Fungsi komunikasi ini mencakup penyampaian kehendak rakyat kepada pengambil kebijakan sekaligus menjadi sarana penyebaran informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa partai politik dalam perannya sebagai sarana komunikasi untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia telah memanfaatkan platform sosial media dengan baik. Selain sebagai sarana membangun *image*, partai politik juga menggunakan sosial media sebagai wadah untuk menyerap aspirasi-aspirasi dari masyarakat luas. Menurut Firdaus (2021), efektivitas komunikasi politik sangat bergantung pada kemampuan partai dalam membaca dinamika sosial serta penggunaan media digital yang strategis, khususnya dalam menjangkau generasi muda.

Sarana Sosialisasi Politik

Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik berarti memiliki tanggung jawab untuk mendidik masyarakat mengenai nilai-nilai demokrasi. Selain untuk memperkenalkan nilai-nilai demokrasi, sosialisasi politik juga merupakan proses bagi partai politik dalam sistem politik. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa partai politik untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia memiliki caranya masing-masing dalam menjalankan peran sebagai sarana sosialisasi politik dengan baik. Beberapa diantaranya melalui temu langsung dengan masyarakat maupun melalui media sosial. Dengan dijalankan peran ini dengan baik, maka dapat memicu partisipasi politik yang lebih luas di Indonesia. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Gaynell dan Bakry (2024) menyatakan bahwa partisipasi politik dapat dipengaruhi oleh sosialisasi politik.

Sarana Rekrutmen Politik



Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik yaitu sarana kaderisasi dalam memilih dan mencari seseorang untuk mengisi posisi politik, baik calon legislatif maupun kepala daerah. Untuk menjamin regenerasi partai dan meningkatkan perluasan dalam sistem demokrasi, rekrutmen politik merupakan sebuah langkah yang krusial untuk dilakukan dengan tepat. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia belum terlaksana dengan baik. masih terdapat berbagai permasalahan-permasalahan selama jalannya peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik tersebut, seperti dominasi ketua umum partai, kapasitas organisasi yang lemah, politik dinasti, serta masih berjalannya politik uang di Indonesia. Dengan permasalahan-permasalahan tersebut, maka dapat menimbulkan dampak negatif, seperti korupsi. Haboddin (dalam Hafsari et al., 2022) menyatakan bahwa proses rekrutmen di partai politik seharusnya dilakukan secara terbuka kepada masyarakat, mengingat partai politik merupakan bagian dari badan publik. Proses rekrutmen seharusnya mencerminkan semangat reformasi, di mana penentuan calon dikembalikan pada kewenangan struktur cabang atau wilayah partai, dan keputusan diambil melalui rapat pleno yang terbuka untuk publik serta diawasi oleh lembaga penegak hukum (Hafsari et al., 2022).

Sarana Pengatur Konflik

Di tengah keberagaman masyarakat seperti di Indonesia, perbedaan pandangan politik dan sosial merupakan sesuatu yang lumrah. Dalam hal ini, partai politik berperan sebagai perantara yang dapat meredam potensi konflik melalui dialog dan upaya kompromi. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam peran partai politik sebagai sarana pengatur konflik untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya dijalani dengan baik. Politik identitas dapat disebabkan oleh faktor-faktor, seperti suku, etnis, agama, ideologi, dan gender. Dengan keberagaman Indonesia, maka politik identitas justru dapat memicu timbulnya perpecahan. Dalam konteks pemilu, meningkatnya penggunaan politik identitas dapat mempengaruhi kualitas demokrasi (Yunus et al., 2023). Hal ini karena pemilih lebih cenderung menentukan pilihan berdasarkan kesamaan identitas, bukan karena visi, misi, atau kemampuan calon yang bersangkutan.

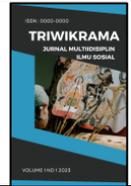
4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Partai politik memiliki peran strategis dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Sebagai representasi gagasan, partai politik menjadi sarana penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Dalam praktiknya, partai politik menjalankan berbagai fungsi seperti komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik. Fungsi komunikasi dan sosialisasi mulai dijalankan dengan memanfaatkan media sosial, baik untuk membangun citra maupun menyerap aspirasi publik. Hal ini juga dapat mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat. Namun, pelaksanaan fungsi rekrutmen politik masih menemui berbagai hambatan, seperti dominasi elit partai, lemahnya struktur organisasi, politik uang, dan praktik politik dinasti. Selain itu, partai politik belum sepenuhnya berhasil menjalankan peran sebagai pengatur konflik, terutama dalam merespons politik identitas yang muncul akibat faktor etnis, agama, ideologi, dan lainnya. Jika tidak dikelola dengan baik, politik identitas dapat mengancam persatuan dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia.

Saran

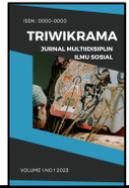
Berdasarkan penelitian di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:



- a. Bagi Partai Politik, untuk memperbaiki sistem kaderisasi secara transparan dan adil supaya proses rekrutmen berjalan lebih baik dan tidak didominasi oleh elit atau politik dinasti. Selain itu, partai politik juga perlu memanfaatkan media sosial secara aktif untuk menyerap aspirasi masyarakat dan meningkatkan partisipasi politik
- b. Bagi Pemerintah dan KPU, untuk memperkuat pengawasan serta penegakan aturan terkait politik uang agar proses demokrasi lebih bersih dan adil.
- c. Bagi Lembaga Pengawas dan Masyarakat Sipil, diharapkan dapat menjalankan program pendidikan politik yang mendorong politik yang inklusif dan mengurangi konflik akibat politik identitas.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). Pengantar Ilmu Politik. Intrans Publishing.
- Andriana, N. (2022). Pandangan Partai Politik terhadap Media Sosial Sebagai Salah Satu Alat Komunikasi Politik Untuk Mendekati Pemilih Muda (Gen Y dan Z): Studi Kasus PDI-P dan PSI. *Jurnal Penelitian Politik*, 19(1), 51-65.
- BBC News Indonesia. (2023). "Mengapa Partai Ummat gaungkan 'politik identitas' - dan kenapa pilihan itu dianggap 'berbahaya'?". Diakses pada 05 April 2025, dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c14nxqz57jqo>
- Begouvic, M. E. H. (2021). Money Politik Pada Kepemiluan di Indonesia. *SOL JUSTICIA*, 4-2.
- Cecep, H., Muhamad, S., Siddiq, S., Nashihul, M., Mulkiyansyah, U., Nailah, A., Nadiya, A., Risalah, A., Dakwah, F., Uin, K., Gunung, S., & Bandung, D. (2022). Demokrasi Politik Indoensia. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <https://fdk.uinsgd.ac.id/>
- Fadhil, M. N., & Putra, D. K. S. (2024). Strategi Komunikasi Politik Partai Nasdem Untuk Gen-Z Pada Pemilu Legislatif Kota Bandung 2024 Melalui Instagram @Nasdem.Bdg. *E-Proceeding of Management*, 11(6), 7549-7556.
- Fahruiji, D., & Fahrudin, A. (2023). Pemanfaatan Media Sosial dalam Kampanye Politik Menjelang Pemilu 2024: Studi Kasus tentang Akun Media Sosial Partai Politik dan Politisi. *JIKA (Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan)*, 6(2), 118-132.
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dan Badan Pengkajian MPR. (2018). *Kajian Akademik Penegakan Demokrasi Pancasila*. Badan Pengkajian MPR RI.
- Fatiha, A. S., Soeharjoto, & Santosa, W. (2022). Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia. *JPDSH Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 346-352.
- Fatimah, S., Zen, N. H., & Fitriasia, A. (2025). Literatur Riview dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Khusus. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 41-48.
- Firdaus, R. K. A. (2021). Implementasi Fungsi Komunikasi Politik DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus Tahun 2021. Skripsi (S1), Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Gaynell, N. E., & Bakry, G. N. (2024). Pengaruh Sosialisasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula di Pulau Jawa Menjelang Pemilu 2024. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 8(1), 43-56.
- Hafsari, I., Andriyani, L., & Setiawan, A. (2022). Peran Mesin Partai Politik Dalam Pembentukan Dinasti Ratu Atut Chosiyah di Provinsi Banten. *INTEGRALISTIK*, 33(2), 90-99.
- Kurniawan, F., & Handayani, R. S. (2022). Pelaksanaan fungsi partai politik dan dampaknya pada konsolidasi demokrasi. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 21(2), 65-76.



- pkj-jksel.id. (2024). "Aktivitas Ground Campaign dan Sosialisasi Melalui "PKS Menyapa" di Srengseng Sawah". Diakses pada 05 April 2025, dari <https://www.pks-jksel.id/aktivitas-ground-campaign-dan-sosialisasi-melalui-pks-menyapa-di-srengseng-sawah/>
- pkskotategal.id. (2025). "Peran Sosialisasi PKS dalam Membangun Kesadaran Politik di Kota Tegal". Diakses pada 05 April 2025, dari <https://pkskotategal.id/2025/01/peran-sosialisasi-pks-dalam-membangun-kesadaran-politik-di-kota-tegal/>
- Ridwan, M. A., & Fatkhuri. (2023). Dinamika Personalisasi Partai Politik Dalam Rekrutmen Bakal Calon Walikota Solo 2020 (Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)). JPW (Jurnal Politik Walisongo), 5(1), 1-16.
- Sa'ban, L. M. A., Sadat, A., & Hanafi. (2025). Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik. JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, 9(1), 364-373.
- Sutmasa, Y. G. (2025). Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik dan Rekrutmen Kepemimpinan Politik Partai Politik di Indonesia. Cakrawarti, 8(1), 20-30.
- Swasty, R. (2025). "Program Remaja Bernegara, Upaya NasDem Kenalkan Politik ke Generasi Muda". Diakses pada 05 April 2025, dari <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/ZkeZ1qqK-program-remaja-bernegara-upaya-nasdem-kenalkan-politik-ke-generasi-muda>
- Toloh, P. W. Y. (2023). Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum Yang Demokratis. JAPHTN-HAN, 2(1), 142-168.
- Yehezkiel, P. C., & Takalamingan, M. (2023). Peran Partai Politik Mengatasi Politik Identitas Dalam Pemilu. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 4(2), 251-273.
- Yunus, F. M., Yasin, T. H., & Rijal, S. (2023). Politik Identitas dan Politisasi Agama dalam Konteks Pemilu di Indonesia. Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial, 9(2), 121-137.